



IKU TAHUN 2017-2021

**PENETAPAN KINERJA DAN
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)**

**DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, harus dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hutan sebagai modal pembangunan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, hutan telah memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya. Hutan mempunyai peranan sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global, sehingga keterkaitannya dengan dunia Internasional menjadi sangat penting, dengan tetap mengutamakan kepentingan Nasional.

Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa terkandung jiwa dan semangat kerakyatan, keadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyelenggaraan kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan serta bertanggung gugat.

Hutan di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan kedua Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 19 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Daerah Tingkat I Provinsi Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua juta enam ratus ribu dua ratus delapan puluh enam) Ha, sehingga kawasan hutan Provinsi Sumatera Barat seluas $\pm$ 2.342.893 Ha. Sebagian besar Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sumatera Barat berada pada jajaran Bukit Barisan dengan topografi bergelombang dan merupakan daerah tangkapan air (catchment area), hulu-hulu sungai-sungai yang mengalir ke Provinsi Riau dan Jambi. Kondisi tersebut memiliki kaitan erat dengan ekosistem kawasan hutan yang sebagian besar berfungsi sebagai Hutan Lindung dan Hutan Konservasi.

Kondisi kawasan hutan Sumatera Barat sampai dengan saat sekarang terus mengalami tekanan sebagai akibat adanya proses perkembangan pembangunan terutama kebutuhan wilayah untuk kegiatan non kehutanan. Tekanan terhadap lahan hutan baik untuk kebutuhan masyarakat maupun untuk pembangunan non-kehutanan dirasakan terus meningkat sehingga lahan kritis saat ini berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dan Perhutanan Sosial Nomor : SK.4/V-DAS/2015 Tentang Penetapan Peta Dan Data Hutan Dan Lahan Kritis Nasional Tahun 2013 seluas $\pm$ 485.907 Ha kritis dan 144.788 Ha Sangat Kritis. Disisi lain tekanan terhadap lahan hutan adanya perambahan hutan/peladang berpindah dan kebakaran hutan perlu mendapat perhatian pemerintah.

Pembangunan kehutanan Sumatera Barat merupakan bagian dari pembangunan kehutanan nasional, yang akan diwujudkan melalui visi dan misi pembangunan kehutanan Sumatera Barat. Namun perlu disadari bersama bahwa pada hakekatnya pengelolaan hutan harus

didasari atas prinsip pengelolaan yang bertanggung jawab/ accountable, menjaga daya dukungnya secara lestari (sustainable) harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat adat dan budaya serta tata nilai masyarakat Sumatera Barat dengan memperhatikan norma hukum nasional.

Mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategik (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2015 – 2019, pengelolaan sumber daya hutan lebih mempertimbangkan keseimbangan antara aspek budaya, ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat.

Untuk itu telah dirumuskan bersama komitmen institusi kehutanan Provinsi Sumatera Barat dituangkan dalam bentuk perencanaan yang akan dijadikan acuan sementara yaitu Draft Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021.

Berkenaan dengan Pelaksanaan RENSTRA dalam tahun berjalan maka dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam Hal mengukur hasil pencapaian dari pelaksanaan program dan kegiatan maka di pandang perlu untuk di tetapkan Indikator Kinerja utama (IKU) yang merupakan keluaran Program Pembangunan Kehutanan.

B. Ruang Lingkup Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 mencakup Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerjanya yang menjadi satu kesatuan sebagai akibat peningkatan tataran pengukuran kinerja dari keluaran (output) kegiatan menjadi keluaran program (outcome) pada Tahun 2017-2021.

A. Pernyataan Visi

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk RPJM ke-3, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2015-2019, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, maka visi Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

B. Pernyataan Misi dan Tujuan

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi kelima yang menjadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 seperti pada tabel berikut:

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai Arahan KemenPAN-RB Oktober 2018
1.	Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.	Meningkatnya Kinerja Organisasi.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	

C. Sasaran Strategis

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran
Periode 2016-2021

No	Tujuan	Tujuan sesuai Arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	83	84	85
				Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	%	80	81	82	83	84	85
2.	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09	2,00	2,21	2,26
				Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	5,15	6,15	7,15	8,15
				Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	15	20	25	30
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5.32	8.50	11.68	14.86	18,03	21.21
4.	Terwujudnya	2. Meningkatkan Kinerja Organisasi.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

D. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan kedalam program dan kegiatan pembangunan kehutanan yang dikerjakan secara bertahap per tahun. Mengingat

kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pembangunan Kehutanan di Provinsi Sumatera Barat tidak dapat lepas dari kebijakan Pembangunan Kehutanan Nasional melalui kebijakan prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dan Kebijakan Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat maka kebijakan dan strategi Pembangunan Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan Kebijakan Prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci kebijakan dan strategi pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel langkah-langkah strategis pencapaian sasaran pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Langkah-Langkah Strategis Pencapaian Sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
Semula: Terwujudnya kepastian dalam penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya Menjadi : Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Pemantapan Kawasan Hutan	Percepatan Proses Penyelesaian RTRW subtransi kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1. Program Perencanaan makro dan Pemantapan Kawasan Hutan (APBD)	• Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan • Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan • Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan • Pembentukan Petak Ukur Permanen
	Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Hutan	Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN) 3. Program Pemanfaatan Potensi SDH (APBD)	• Planologi dan Tata Lingkungan • Optimalisasi PNB • Pengembangan Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman • Pengembangan Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan • Pembinaan dan Pengembangan Aneka Guna Hutan (AGH) • Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH • Pembinaan dan Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				• Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH
Semula: Meningkatnya daya dukung hutan dan lahan dalam peningkatan fungsi ekologis serta pemulihan cadangan sumber daya alam. Menjadi: Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Mitigasi Perubahan Iklim	Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim	1. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	• Pengamanan dan Perlindungan Hutan • Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan • Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan • Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA • Pegendalian Dampak Perubahan Iklim • Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan
	Percepatan Rehabilitasi Hutan dan lahan	Penyediaan bibit dan peningkatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 3. Program Pengendalian Kebakaran Hutan	• Pembuatan bibit/benih Tanaman Hutan • Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan • Konservasi Sumber Daya Genetik • Pengembangan Sarana Konservasi tanah • Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL • Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS • Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH • Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
Semula : Meningkatnya Kemitraan dengan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui pola HTR, HN dan HKm. Menjadi : Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm	4. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	• Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan • Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan • Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan • Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat • Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan • Pengembangan Hutan Mangrove

Sasaran	Kebijakan	Strategi	Program	Kegiatan
				Instalasi dan Jaringan
			8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	• Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
			9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• BinteK Implementasi Peraturan Perundang-undangan
			10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	• Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD • Penatausahaan Keuangan SKPD
			11. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan aset	• Penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD • Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD • Pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD
			12. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	• Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan • Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP

BAB III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017-2021

A. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Merujuk Rencana Strategis Revisi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 -2021 untuk Tahun 2017-2021 sasaran strategis dan target Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. Tabel IKU Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Baseline	Formula	Sumber Data	PENANGGUNG JAWAB	Ket
1	2	3		5	4	6	7
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan peruntukannya	100%	= (luas pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan perizinannya pada tahun N/ luas kawasan hutan yang dibebani izin pada tahun N) x 100 %	Intern: Data diperoleh dari laporan hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang diberi izin yang dilakukan oleh Tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	
		b. Persentase pencapaian target produksi HHK (Hasil Hutan Kayu) dan HHBK (Hasil Hutan Bukan Kayu)	76%	= (realisasi produksi HHK dan HHBK tahun N/target produksi HHK dan HHBK tahun N) x 100%	Ekstern: Data diperoleh dari laporan PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi) dari wajib bayar (unit manajemen), instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota pada tahun N dan laporan tersebut akan direkonsiliasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi bersama dengan wajib bayar (unit manajemen) dan Instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota terkait.	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN, DAN UPTD KPHL-BB DINAS KEHUTANAN	

		c. Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	76%	= (realisasi penerimaan negara sektor kehutanan tahun N/ target penerimaan negara sektor kehutanan tahun N) x 100%	Ektern: Data diperoleh dari laporan PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi) dari wajib bayar (unit manajemen), instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota pada tahun N dan laporan tersebut akan direkonsiliasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi bersama dengan wajib bayar (unit manajemen) dan Instansi yang membidangi kehutanan di Kab/Kota terkait.	BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	
2.	Daya Dukung dan Daya Tampung Hutan Meningkat	a. Persentase penurunan luas lahan kritis	630.695 hektar	= (0.8 dikalikan angka jumlah tanaman yang ditanam pada tahun N-5/ luas lahan kritis) x 100%. Dengan asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam	Intern: data diperoleh dari laporan hasil penghitungan jumlah pohon yang ditanam pada tahun N-5. (dengan asumsi tanaman yang baik pertumbuhannya 80% dari jumlah yang ditanam)	BIDANG PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN, UPTD BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN, UPTD KPHL - BB	
		b. Persentase penurunan luas kerusakan hutan	0.61%	= (luas kerusakan hutan dikurang luas kawasan yang diamankan atau dikonservasi / luas hutan lindung dan hutan produksi (HP, HPT, HPK)) X 100%	Intern: Data diperoleh dari laporan tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penanganan laporan tipihut dan monev kasus	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE	

		c. Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	424 titik panas (hotspot)	= (penurunan titik panas (hot spot) di Tahun N/ jumlah rerata titik panas (hot spot) pada periode lima tahun sebelumnya (2011-2015)) x 100%	Intern: Data diperoleh dari hasil pemantauan melalui satelit NOAA sebagai pendeteksi titik api yang terjadi dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang dilakukan oleh tim karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.	BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KSDAE	
3.	Peran Serta masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	33.712 Ha	= (luas kawasan hutan yang diusulkan hingga tahap verifikasi untuk dapat dikelola oleh masyarakat atau kemitraan pada tahun N/ jumlah luas Hutan Lindung dan Hutan Produksi) x 100%	Intern: Data diperoleh dari laporan tim Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang telah ditunjuk untuk melakukan proses pengusulan hingga verifikasi kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat/kemitraan.	BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT	
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	a. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	73,59 % (BB)	Adanya Dokumen Renstra, Perjanjian Kinerja Eselon II, Indikator Kinerja Utama, Rencana Aksi, Monev Rencana Aksi dan Cascading	Jumlah nilai evaluasi perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan pencapaian sasaran/ kinerja organisasi	SEKRETARIAT	
		b. Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	94.08%	= Rata-rata realisasi fisik dan realisasi keuangan dikalikan angka 100 persen	Data yang diperoleh dari laporan setiap bidang dan realisasi SPJ yang diajukan	SEKRETARIAT DAN SELURUH BIDANG	

Note: Sesuai arahan KemenPAN-RB melalui Biro Organisasi pada Oktober 2018 maka Sasaran Strategis ke empat yaitu Meningkatkan Tata Kelola Organisasi yang diukur melalui dua indikator yaitu Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan tidak menjadi Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Tujuh IKU tersebut di atas akan menjadi tolok ukur kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017-2021. Jika dikaitkan dengan Sasaran Strategis dan Program/Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017 maka dapat diuraikan sebagaimana pada Tabel berikut.

No.	Sasaran dan Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator kinerja Kegiatan (output)
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan Indikator: 1. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya 2. Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu 3. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	Program Perencanaan Makro dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pemeliharaan Batas Kawasan Hutan	- Terpeliharanya batas kawasan hutan
			Kajian Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan	- Teridentifikasinya usulan perubahan kawasan hutan dan terlaksananya kajian usulan perubahan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat
			Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	- Terpantau dan termonitornya penggunaan kawasan hutan sesuai peruntukannya
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK (APBN)	Pembentukan Petak Ukur Permanen	- Terbangunnya petak ukur permanen
			Planologi dan Tata Lingkungan	- Terlaksananya penyiapan kelembagaan pembangunan KPH
		Program Pemanfaatan Potensi SDH	Optimalisasi PNBP	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan, iuran Kehutanan dan penggunaan peralatan pada IUPHHK Hutan Alam

			Pengembang an Industri, Hutan Alam dan Hutan Tanaman	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu
			Pengembang an Pengujian, Pengendalian dan Peredaran Hasil Hutan	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan produksi hasil hutan Olahan, Realisasi Pemenuhan bahan baku dan pemasaran hasil hutan, produksi hutan alam dan hutan tanaman
			Pembinaan dan Pengembang an Aneka Guna Hutan (AGH)	- Laporan monitoring dan evaluasi/pembinaan penatausahaan peredaran hasil hutan
			Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Tertentu pada Wilayah Kelola KPH	- Terbinanya kelompok tani dalam budidaya aneka usaha kehutanan
			Pembinaan dan Pengembang an Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	- Tersedianya rencana areal pengembangan hasil hutan bukan kayu pada wilayah KPH
			Pengelolaan potensi hutan pada wilayah KPH	- Tersedianya data potensi wisata alam dan terbentuknya/terbina nya kelompok kepariwisataan alam pada wilayah Kelola KPH
2.	Meningkatnya Kemampuan Hutan Dalam Menjaga Keseimbangan Ekosistem dan Fungsinya	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Hutan	- Tersedianya jumlah bibit yang berkualitas
			Pengembang an Perbenihan	- Tersedianya data produksi dan peredaran

Indikator Sasaran: 1.Persentase Penurunan Luas Lahan Kritis 2.Persentase penurunan laju kerusakan hutan 3.Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)			Tanaman Hutan	benih/bibit tanaman hutan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembangunan hutan tanaman
			Konservasi Sumber Daya Genetik	- Terpeliharanya sumber daya genetik tanaman hutan
		Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Pengembangan Sarana Konservasi tanah	- Termonitornya bangunan KTA di Kab/Kota Prov Sumbar
			Monitoring dan pembinaan Kegiatan RHL	- Terlaksananya monitoring dan pembinaan RHL/Reklamasi/DAK oleh Kab/Kota
			Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan DAS	- Tersusunnya rencana pengelolaan DAS
			Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Wilayah Kelola KPH	- Tersedianya data lahan kritis si wilayah kelola KPH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam	Pengamanan dan Perlindungan Hutan	- Terlaksananya psikotes, operasi intelijen, operasi prefresif/pamhut, monev kasus, tindak lanjut penyelesaian kasus tindak pidana kehutanan (tipihut) dan Koordinasi
			Pengendalian Ekowisata dan Jasa Lingkungan	- Terlaksananya identifikasi dan fasilitasi pengembangan potensi jasa lingkungan
			Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan	- Teridentifikasinya kawasan hutan rawan bencana dan tersosialisasinya bahaya kerusakan hutan

		Program Pengendalian Kebakaran Hutan	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA	- Terlaksananya pelatihan dan Penguatan Lembaga PPHBN
			Pegendalian Dampak Perubahan Iklim	- Terlaksananya pengumpulan data PEP RAD-GRK sektor berbasis kehutanan
			Perlindungan dan Konservasi Alam di Wilayah Kelola KPH	- Termonitornya kondisi pengamanan dan perlindungan kawasan hutan serta tersedianya data satwa dan tumbuhan liar dikawasan hutan wilayah kelola KPH
			Identifikasi dan inventarisasi serta pengembangan kawasan ekosistem essensial dan daerah	- Terbentuk dan teridentifikasinya kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat
			Monitoring evaluasi dan pembinaan pengelolaan ekosistem essensial dan daerah penyangga	- Termonitornya pengelolaan kawasan ekosistem essensial di Provinsi Sumatera Barat
			Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Terlaksananya pemantauan titik panas, patroli pengendalian kebakaran hutan dan lahan, koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sosialisasi pencegahan kebakaran hutan, pemadaman

				kebakaran hutan dan lahan, serta bimbingan teknis kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA)
3.	Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Meningkatkan Indikator Sasaran: Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat Indikator: 1. Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kehutanan	- Terlaksananya Musrenbanghutda, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan antara pusat, provinsi dan kab/kota
			Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM dan wawasan pengelola HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan
			Penyiapan, Pembinaan dan Pengembangan HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan	- Meningkatnya kelompok/lembaga masyarakat yang mengelola hutan (HKm, HN, HTR dan HR Kemitraan)
			Penguatan Forum komunikasi PHBM Sumatera Barat	- Terjalannya komunikasi dan sharing wawasan antar pengelola hutan berbasis masyarakat (HN, HKm, HTR dan HR Kemitraan)
			Peningkatan Kapasitas Penyuluh Kehutanan dan Penguatan Kelembagaan Tani Hutan	- Terlaksananya peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan di Sumatera Barat
			Pengembangan Hutan Mangrove	- Peningkatan SDM masyarakat dalam mengelola hutan mangrove
		Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan	Peningkatan Penyuluhan dan	- Terlaksananya BOP kehutanan - Terlaksananya

		Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kelompok Tani Hutan dari Pemula menjadi Madya
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	- Tersusunnya data dan informasi kehutanan
			Implementasi ISO Pelayanan Dinas Kehutanan dan Operasional SPIP	- Terlaksananya implementasi Sosialisasi ISO 9001:2008 lingkup pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Indikator: 1.Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja 2.Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	- Tersedianya barang-barang pendukung jasa surat menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan internet
			Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	- Terpenuhiannya pembayaran tagihan rekening Pajak Bumi dan Bangunan
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Pengamanan dan Sopir Kantor	- Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor, keamanan dan sopir kantor
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	- Tersedianya alat-alat tulis kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Terlaksananya pengadaan barang-barang cetakan untuk dinas dan UPTD
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	- Terlaksananya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-undangan	- Tersedianya bahan bacaan berupa surat kabar dan warta perundang-undangan
			Penyediaan Makanan dan Minuman	- Tersedianya makanan dan minuman rapat
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah	- Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
			Penyediaan Jasa Informasi Dokumenter dan Publikasi	- Tersedianya jasa dokumentasi dan publikasi
			Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	- Tersedianya jasa pembinaan fisik dan mental aparatur : instruktur senam; pembacaan Al-Quran; Ustadz
			Pembangunan Gedung kantor	- Gedung kantor yang terbangun
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Kebutuhan kendaraan dinas yang terpenuhi
			Pengadaan Mubelair	- Terlaksananya pengadaan meubelair
			Pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan gedung kantor
			Pengadaan peralatan/perengkapan kantor	- Terlaksananya pengadaan peralatan/perengkapan kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan/Rumah	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas

			Dinas/Mess	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	- Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	- Terlaksananya pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	- Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	- Terlaksananya keikutsertaan aparatur dalam mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Terlaksananya penyusunan laporan keuangan, LAKIP, LPPD, LKPJ dan laporan tahunan
		Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan	Penatausahaan Keuangan SKPD	- Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan SKPD baik penerimaan maupun pengeluaran
			Penyusunan perencanaan dan	- Tersusunnya dokumen RKA, DPA, DPPA, Renja, Renstra

		dan Pengendalian Kegiatan dan aset	penganggara n SKPD	
			Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD	- Terlaksananya Monito ring dan Evaluasi Program dan Kegiatan SKPD
			Pengelolaan, pengawasan dan pengendalian asset SKPD	- Terlaksananya pengelolaan, pengawsan dan pengendalian asset SKPD
		Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK	Program, evaluasi dan pelaporan	- Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan administrasi dan perencanaan kehutanan

BAB VI PENUTUP

Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi Pembangunan kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan bagian dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta Revisi Rencana Straregis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017-2021 merupakan pedoman/acuan bagi Sekretariat, Bidang dan UPTD lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja Tahun 2017-2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dalam DPA-SKPD dengan sebaik-baiknya.
2. Unit Kerja lingkup Dinas Kehutanan Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan point-point Penetapan Kinerja ini sesuai dengan yang termuat di dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan target, tolok ukur dan indikator kinerja yang terukur, transparan dan akuntable.
3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang Telp (0751) 7052725-7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 050 / 3998 / Sekr - 2017

TENTANG
REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
e. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
h. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN : Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan acuan dalam mengukur keberhasilan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada lampiran telah sesuai dengan *cas cading* yang disusun oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 Oktober 2017

**KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**


Ir. HENDRI OCTAVIA, MSi
NIP. 19581029 198703 1 003